



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 005/40/BPBD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal permohonan SK Parsial, Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 525/Dinkes-PK/DAK-NF/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran Mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang berubah terdiri dari :

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.414.388.072.382,00	1.412.137.733.520,00	(2.250.338.862,00)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	175.940.897.280,55	175.940.897.280,55	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	76.947.960.190,53	76.947.960.190,53	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.299.730.881,83	7.299.730.881,83	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dirincikan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.693.206.208,19	77.693.206.208,19	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.063.362.814.000,00	1.061.112.475.138,00	(2.250.338.862,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.547.034.000,00	38.547.034.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	752.773.975.000,00	752.773.975.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	272.041.805.000,00	269.791.466.138,00	(2.250.338.862,00)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	175.084.361.101,45	175.084.361.101,45	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	46.807.520.000,00	46.807.520.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.861.566.301,45	49.861.566.301,45	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.274.262.000,00	68.274.262.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.433.881.119.822,00	1.433.881.119.822,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	750.366.085.277,27	749.660.810.277,27	(705.275.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	598.548.436.619,27	598.548.436.619,27	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	140.194.753.900,00	140.194.753.900,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.422.894.758,00	1.717.619.758,00	(705.275.000,00)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	683.515.034.544,73	684.220.309.544,73	705.275.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	13.277.503.040,00	13.277.503.040,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	361.079.618.500,73	361.079.618.500,73	0,00
2.2.3	Belanja Modal	309.157.913.004,00	309.863.188.004,00	705.275.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(19.493.047.440,00)	(21.743.386.302,00)	(2.250.338.862,00)
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.493.047.440,00	26.743.386.302,00	2.250.338.862,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.493.047.440,00	24.743.386.302,00	2.250.338.862,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	19.493.047.440,00	21.743.386.302,00	2.250.338.862,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

**AR SIP**  
**BAGIAN HUKUM**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
SEKRETARIS :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
ANDI YATHRIB PARE

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor Tahun 2018  
 Tentang : Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.414.388.072.382,00	1.412.137.733.520,00	-2.250.338.862,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	175.940.897.280,55	175.940.897.280,55	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	76.947.960.190,53	76.947.960.190,53	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	7.299.730.881,83	7.299.730.881,83	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.693.206.208,19	77.693.206.208,19	0,00
1.1.1.4	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.063.362.814.000,00	1.061.112.475.138,00	-2.250.338.862,00
1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.547.034.000,00	38.547.034.000,00	0,00
1.2.1	Dana Alokasi Umum	752.773.975.000,00	752.773.975.000,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	272.041.805.000,00	269.791.466.138,00	-2.250.338.862,00
1.2.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	175.084.361.101,45	175.084.361.101,45	0,00
1.3	Pendapatan Hibah	46.807.520.000,00	46.807.520.000,00	0,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	49.861.566.301,45	49.861.566.301,45	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.274.262.000,00	68.274.262.000,00	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.141.012.800,00	10.141.012.800,00	0,00
1.3.4	<b>BELANJA</b>	1.433.881.119.822,00	1.433.881.119.822,00	0,00
1.3.5	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	750.366.085.277,27	749.660.810.277,27	-705.275.000,00
2	Belanja Pegawai	598.548.436.619,27	598.548.436.619,27	0,00
2.1	Belanja Hibah	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	0,00
2.1.1	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	140.194.753.900,00	140.194.753.900,00	0,00
2.1.3	Belanja Tidak Terduga	2.422.894.758,00	1.717.619.758,00	-705.275.000,00
2.1.4	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	683.515.034.544,73	684.220.309.544,73	705.275.000,00
2.2	Belanja Pegawai	13.277.503.040,00	13.277.503.040,00	0,00
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	361.079.618.500,73	361.079.618.500,73	0,00
2.2.2	Belanja Modal	309.157.913.004,00	309.863.188.004,00	705.275.000,00
2.2.3	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-19.493.047.440,00	-21.743.386.302,00	-2.250.338.862,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.493.047.440,00	26.743.386.302,00	2.250.338.862,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.493.047.440,00	24.743.386.302,00	2.250.338.862,00

**ABR**  
 BAGIAN HUKUM

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	19.493.047.440,00	21.743.386.302,00	2.250.338.862,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PARAF  
 SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 Pangkajene, .....

**IRDAS, SH, M.Si**  
 NIP. 19660920 193303 1 011

SYAMSUDDIN A. HAMID

**ARSIP**  
 BAGIAN HUKUM

Urusan Pemerintahan : 4  
 Bidang Pemerintahan : 1.06  
 Unit Organisasi : 1.06 . 4.01.05  
 Sub Unit Organisasi : 1.06 . 4.01.05 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
5	Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana lingkungan dan rumah penduduk pasca bencana							
5.2	BELANJA							
5.2.3	BELANJA LANGSUNG							
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tetap							
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tetap							
	Belanja Modal Gedung Tetap Pendidikan							
	- Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao Ke.Tondong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan							
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan							
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman							
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman							
	Belanja Rehabilitasi Sungai Panokajene Kelurahan Padabang-Doangan							
	- Rehabilitasi Tebing Sungai Panokajene Kel.Padabang-Doangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao							
	- Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao							
	- Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao							
	- Rehabilitasi Tebing Pengaman Jalan SMPN 4 SATAP Desa Bonto Brao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Jasa Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disetujui Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep

CATATAN

1. Usulan Surat = Kepala Dinas Kesehatan
2. Sumber Dana = Belanja Tidak Terduga
3. Bentuk Pegereran = Pegereran belanja tidak terduga untuk belanja hibah
4. Tingkat Persetujuan = Penyampaian ke DPRD
5. CatatanLainnya =



PARAF :  
 SEK DA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

**ARSIP**  
 BAGIAN HUKUM

Lampiran : Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor : 17 Tahun 2018  
 Tentang : Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4  
 Bidang Pemerintahan : 4.04  
 Unit Organisasi : 4.04.07  
 Sub Unit Organisasi : 4.04.07.02

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Keuangan  
 Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH
		VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	
5	<b>BELANJA</b>			151.817.648.658,00		-705.275.000,00
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			151.817.648.658,00		-705.275.000,00
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>			6.200.000.000,00		0,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			6.200.000.000,00		0,00
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			6.200.000.000,00		0,00
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			3.000.000.000,00		0,00
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat			2.550.000.000,00		0,00
5.1.5.02.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Pengurus Masjid			2.550.000.000,00		0,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			450.000.000,00		0,00
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana			50.000.000,00		0,00
5.1.5.03.03	Belanja Bantuan Sosial Uang Duka			250.000.000,00		0,00
5.1.5.03.04	Belanja Bantuan Sosial Penyelesaian Studi			150.000.000,00		0,00
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada</b>			140.194.753.900,00		0,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Dari Pemerintah			60.274.262.000,00		0,00
5.1.7.03.02	Desa Kabba Kecamatan Minasale'he			792.991.000,00		0,00
5.1.7.03.03	Desa Pnaikang Kecamatan Minasale'he			844.958.000,00		0,00
5.1.7.03.04	Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci			904.246.000,00		0,00
5.1.7.03.05	Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Talissa			843.312.000,00		0,00
5.1.7.03.06	Desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Talissa			845.959.000,00		0,00
5.1.7.03.07	Desa Lamre Kecamatan Tondong Talissa			798.154.000,00		0,00
5.1.7.03.08	Desa Bulu Teluu Kecamatan Tondong Talissa			922.169.000,00		0,00
5.1.7.03.09	Desa Malaka Kecamatan Tondong Talissa			757.680.000,00		0,00
5.1.7.03.10	Desa Bonto Brao Kecamatan Tondong Talissa			1.015.306.000,00		0,00
5.1.7.03.11	Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro			851.393.000,00		0,00
5.1.7.03.12	Desa Tabo'Tabo Kecamatan Bungoro			984.636.000,00		0,00
5.1.7.03.13	Desa Mangilu Kecamatan Bungoro			864.743.000,00		0,00
5.1.7.03.14	Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro			830.149.000,00		0,00
5.1.7.03.15	Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro			737.379.000,00		0,00
5.1.7.03.16	Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang			811.247.000,00		0,00
5.1.7.03.17	Desa Manakku Kecamatan Labakkang			843.211.000,00		0,00

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
5.1.7.03.18	Desa Gentung Kecamatan Labakkang				781.192.000,00			0,00
5.1.7.03.19	Desa Batara Kecamatan Labakkang				910.523.000,00			0,00
5.1.7.03.20	Desa Tarawang Kecamatan Labakkang				885.870.000,00			0,00
5.1.7.03.21	Desa Kanaung Kecamatan Labakkang				987.374.000,00			0,00
5.1.7.03.22	Desa Bontomanai Kecamatan Labakkang				982.109.000,00			0,00
5.1.7.03.23	Desa Kassioe Kecamatan Labakkang				1.024.057.000,00			0,00
5.1.7.03.24	Desa Bara Batu Kecamatan Marang				984.913.000,00			0,00
5.1.7.03.25	Desa Padang Lampe Kecamatan Marang				867.299.000,00			0,00
5.1.7.03.26	Desa Tamangapa Kecamatan Marang				879.135.000,00			0,00
5.1.7.03.27	Desa Pitusunggu Kecamatan Marang				754.024.000,00			0,00
5.1.7.03.28	Desa Plue Kecamatan Marang				804.805.000,00			0,00
5.1.7.03.29	Desa Purranga Kecamatan Marang				782.087.000,00			0,00
5.1.7.03.30	Desa Alesipitto Kecamatan Marang				761.209.000,00			0,00
5.1.7.03.31	Desa Baring Kecamatan Segeri				916.660.000,00			0,00
5.1.7.03.32	Desa Parengeng Kecamatan Segeri				932.442.000,00			0,00
5.1.7.03.33	Desa Benteng Kecamatan Mandalle				865.194.000,00			0,00
5.1.7.03.34	Desa Manggaling Kecamatan Mandalle				731.687.000,00			0,00
5.1.7.03.35	Desa Tamarupa Kecamatan Mandalle				819.983.000,00			0,00
5.1.7.03.36	Desa Mandalle Kecamatan Mandalle				772.462.000,00			0,00
5.1.7.03.37	Desa Bordlie Kecamatan Mandalle				798.726.000,00			0,00
5.1.7.03.38	Desa Corpo Tompong Kecamatan Mandalle				803.279.000,00			0,00
5.1.7.03.39	Desa Mattiro Deceng Kecamatan Luukang Tupabbiring				1.089.270.000,00			0,00
5.1.7.03.40	Desa Mattiro Langi Kecamatan Luukang Tupabbiring				1.347.431.000,00			0,00
5.1.7.03.41	Desa Mattiro Madae Kecamatan Luukang Tupabbiring				937.609.000,00			0,00
5.1.7.03.42	Desa Mattiro Ujung Kecamatan Luukang Tupabbiring				831.595.000,00			0,00
5.1.7.03.43	Desa Mattiro Dolangeng Kecamatan Luukang Tupabbiring				1.009.474.000,00			0,00
5.1.7.03.44	Desa Mattiro Bone Kecamatan Luukang Tupabbiring				754.883.000,00			0,00
5.1.7.03.45	Desa Mattiro Adae Kecamatan Luukang Tupabbiring				1.130.015.000,00			0,00
5.1.7.03.46	Desa Babo-baloang Kecamatan Luukang Tupabbiring				1.283.784.000,00			0,00
5.1.7.03.47	Desa Sabalana Kecamatan Luukang Tangaya				1.353.275.000,00			0,00
5.1.7.03.48	Desa Sabaru Kecamatan Luukang Tangaya				1.361.895.000,00			0,00
5.1.7.03.49	Desa Tappaang Kecamatan Luukang Tangaya				794.295.000,00			0,00
5.1.7.03.50	Desa Salliu Kecamatan Luukang Tangaya				1.259.738.000,00			0,00
5.1.7.03.51	Desa Salanger Kecamatan Luukang Tangaya				789.204.000,00			0,00
5.1.7.03.52	Desa Kapposang Ball Kecamatan Luukang Tangaya				808.819.000,00			0,00
5.1.7.03.53	Desa Policono Kecamatan Luukang Tangaya				831.591.000,00			0,00
5.1.7.03.54	Desa Pannas Kecamatan Luukang Kaimas				1.294.012.000,00			0,00
5.1.7.03.55	Desa Sabaru Kecamatan Luukang Kaimas				831.476.000,00			0,00
5.1.7.03.56	Desa Kanyurang Kecamatan Luukang Kaimas				1.300.913.000,00			0,00
5.1.7.03.57	Desa Doang-Doangan Lompo Kecamatan Luukang Kaimas				757.536.000,00			0,00
5.1.7.03.58	Desa Marasende Kecamatan Luukang Kaimas				1.183.502.000,00			0,00

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
5.1.7.03.59	Desa Dewakang Kecamatan Luikang Kalmas			1.153.819,00			1.153.819.000,00	0,00
5.1.7.03.60	Desa Mattiro Bulu Kecamatan Luikang Tupabbiring Utara			1.241.531.000,00			1.241.531.000,00	0,00
5.1.7.03.61	Desa Mattiro Ulueng Kecamatan Luikang Tupabbiring Utara			1.266.598.000,00			1.266.598.000,00	0,00
5.1.7.03.62	Desa Mattiro Kanja Kecamatan Luikang Tupabbiring Utara			794.048.000,00			794.048.000,00	0,00
5.1.7.03.63	Desa Mattiro Bombang Kecamatan Luikang Tupabbiring			790.644.000,00			790.644.000,00	0,00
5.1.7.03.64	Desa Mattiro Walle Kecamatan Luikang Tupabbiring Utara			771.463.000,00			771.463.000,00	0,00
5.1.7.03.65	Desa Mattiro Baji Kecamatan Luikang Tupabbiring Utara			811.700.000,00			811.700.000,00	0,00
5.1.7.03.66	Desa Mattiro Labalinge Kecamatan Luikang Tupabbiring			801.579.000,00			801.579.000,00	0,00
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Dari Kabupaten/Kota			79.132.100.900,00			79.132.100.900,00	0,00
5.1.7.04.02	Desa Kabba Kecamatan Minasate'ne			1.184.143.000,00			1.184.143.000,00	0,00
5.1.7.04.03	Desa Panaikang Kecamatan Minasate'ne			1.210.169.000,00			1.210.169.000,00	0,00
5.1.7.04.04	Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci			1.239.862.000,00			1.239.862.000,00	0,00
5.1.7.04.05	Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Talissa			1.209.345.000,00			1.209.345.000,00	0,00
5.1.7.04.06	Desa Tondong Kura Kecamatan Tondong Talissa			1.210.671.000,00			1.210.671.000,00	0,00
5.1.7.04.07	Desa Lanne Kecamatan Tondong Talissa			1.186.729.000,00			1.186.729.000,00	0,00
5.1.7.04.08	Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Talissa			1.248.838.000,00			1.248.838.000,00	0,00
5.1.7.04.09	Desa Malaka Kecamatan Tondong Talissa			1.166.459.000,00			1.166.459.000,00	0,00
5.1.7.04.10	Desa Bonto Birao Kecamatan Tondong Talissa			1.216.579.000,00			1.216.579.000,00	0,00
5.1.7.04.11	Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro			1.213.392.000,00			1.213.392.000,00	0,00
5.1.7.04.12	Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro			1.280.123.000,00			1.280.123.000,00	0,00
5.1.7.04.13	Desa Mangilu Kecamatan Bungoro			1.220.079.000,00			1.220.079.000,00	0,00
5.1.7.04.14	Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro			1.202.753.000,00			1.202.753.000,00	0,00
5.1.7.04.15	Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro			1.156.291.000,00			1.156.291.000,00	0,00
5.1.7.04.16	Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang			1.193.286.000,00			1.193.286.000,00	0,00
5.1.7.04.17	Desa Manakku Kecamatan Labakkang			1.209.295.000,00			1.209.295.000,00	0,00
5.1.7.04.18	Desa Gentung Kecamatan Labakkang			1.178.234.000,00			1.178.234.000,00	0,00
5.1.7.04.19	Desa Batara Kecamatan Labakkang			1.243.006.000,00			1.243.006.000,00	0,00
5.1.7.04.20	Desa Taraweang Kecamatan Labakkang			1.230.659.000,00			1.230.659.000,00	0,00
5.1.7.04.21	Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang			1.281.495.000,00			1.281.495.000,00	0,00
5.1.7.04.22	Desa Bontomina'i Kecamatan Labakkang			1.278.858.000,00			1.278.858.000,00	0,00
5.1.7.04.23	Desa Kasiloe Kecamatan Labakkang			1.220.962.000,00			1.220.962.000,00	0,00
5.1.7.04.24	Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang			1.280.262.000,00			1.280.262.000,00	0,00
5.1.7.04.25	Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang			1.221.358.000,00			1.221.358.000,00	0,00
5.1.7.04.26	Desa Tamangapa Kecamatan Ma'rang			1.227.286.000,00			1.227.286.000,00	0,00
5.1.7.04.27	Desa Pihusingga Kecamatan Ma'rang			1.164.628.000,00			1.164.628.000,00	0,00
5.1.7.04.28	Desa Pihue Kecamatan Ma'rang			1.190.060.000,00			1.190.060.000,00	0,00
5.1.7.04.29	Desa Punranga Kecamatan Ma'rang			1.178.682.000,00			1.178.682.000,00	0,00
5.1.7.04.30	Desa Alesipitto Kecamatan Ma'rang			1.168.226.000,00			1.168.226.000,00	0,00
5.1.7.04.31	Desa Baring Kecamatan Segeri			1.246.080.000,00			1.246.080.000,00	0,00
5.1.7.04.32	Desa Pareneng Kecamatan Segeri			1.253.984.000,00			1.253.984.000,00	0,00
5.1.7.04.33	Desa Benteng Kecamatan Mandalle			1.220.304.000,00			1.220.304.000,00	0,00
5.1.7.04.34	Desa Manggalang Kecamatan Mandalle			1.153.443.900,00			1.153.443.900,00	0,00

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
5.1.7.04.35	Desa Tamnaja Kecamatan Mandalle			1.197.661,00			1.197.661.000,00	0,00
5.1.7.04.36	Desa Mandalle Kecamatan Mandalle			1.173.862,00			1.173.862.000,00	0,00
5.1.7.04.37	Desa Boddie Kecamatan Mandalle			1.187.015,00			1.187.015.000,00	0,00
5.1.7.04.38	Desa Coppo Tompong Kecamatan Mandalle			1.189.296,00			1.189.296.000,00	0,00
5.1.7.04.39	Desa Mattiro Deceng Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.253.622,00			1.253.622.000,00	0,00
5.1.7.04.40	Desa Mattiro Langi Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.304.011,00			1.304.011.000,00	0,00
5.1.7.04.41	Desa Mattiro Matae Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.256.571,00			1.256.571.000,00	0,00
5.1.7.04.42	Desa Mattiro Ujung Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.203.477,00			1.203.477.000,00	0,00
5.1.7.04.43	Desa Mattiro Dolaneng Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.213.658,00			1.213.658.000,00	0,00
5.1.7.04.44	Desa Mattiro Bone Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.165.058,00			1.165.058.000,00	0,00
5.1.7.04.45	Desa Mattiro Adae Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.195.124,00			1.195.124.000,00	0,00
5.1.7.04.46	Desa Balo-Balolang Kecamatan Luukang Tangaya			1.272.135,00			1.272.135.000,00	0,00
5.1.7.04.47	Desa Sabalana Kecamatan Luukang Tangaya			1.306.938,00			1.306.938.000,00	0,00
5.1.7.04.48	Desa Sabaru Kecamatan Luukang Tangaya			1.311.255,00			1.311.255.000,00	0,00
5.1.7.04.49	Desa Tampoang Kecamatan Luukang Tangaya			1.184.796,00			1.184.796.000,00	0,00
5.1.7.04.50	Desa Sallius Kecamatan Luukang Tangaya			1.260.092,00			1.260.092.000,00	0,00
5.1.7.04.51	Desa Satanger Kecamatan Luukang Tangaya			1.182.247,00			1.182.247.000,00	0,00
5.1.7.04.52	Desa Kaposang Bali Kecamatan Luukang Tangaya			1.192.070,00			1.192.070.000,00	0,00
5.1.7.04.53	Desa Poleorro Kecamatan Luukang Tangaya			1.203.475,00			1.203.475.000,00	0,00
5.1.7.04.54	Desa Pannas Kecamatan Luukang Kalmas			1.277.258,00			1.277.258.000,00	0,00
5.1.7.04.55	Desa Sabaru Kecamatan Luukang Kalmas			1.203.417,00			1.203.417.000,00	0,00
5.1.7.04.56	Desa Kanyurug Kecamatan Luukang Kalmas			1.280.714,00			1.280.714.000,00	0,00
5.1.7.04.57	Desa Doang-Doangan Lompo Kecamatan Luukang Kalmas			1.166.387,00			1.166.387.000,00	0,00
5.1.7.04.58	Desa Marasende Kecamatan Luukang Kalmas			1.221.912,00			1.221.912.000,00	0,00
5.1.7.04.59	Desa Dewakang Kecamatan Luukang Kalmas			1.207.046,00			1.207.046.000,00	0,00
5.1.7.04.60	Desa Mattiro Bulu Kecamatan Luukang Tupabbiring Utara			1.250.974,00			1.250.974.000,00	0,00
5.1.7.04.61	Desa Mattiro Uleug Kecamatan Luukang Tupabbiring Utara			1.263.528,00			1.263.528.000,00	0,00
5.1.7.04.62	Desa Mattiro Kanja Kecamatan Luukang Tupabbiring Utara			1.184.673,00			1.184.673.000,00	0,00
5.1.7.04.63	Desa Mattiro Bombang Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.182.968,00			1.182.968.000,00	0,00
5.1.7.04.64	Desa Mattiro Walle Kecamatan Luukang Tupabbiring Utara			1.173.362,00			1.173.362.000,00	0,00
5.1.7.04.65	Desa Mattiro Baji Kecamatan Luukang Tupabbiring Utara			1.193.513,00			1.193.513.000,00	0,00
5.1.7.04.66	Desa Mattiro Labangeng Kecamatan Luukang Tupabbiring			1.188.444,00			1.188.444.000,00	0,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			788.391,00			788.391.000,00	0,00
5.1.7.05.02	Partai Hati Nurani Rakyat			31.900,500			31.900.500,00	0,00
5.1.7.05.06	Partai Gerakan Indonesia Raya			67.959,000			67.959.000,00	0,00
5.1.7.05.09	Partai Keadilan Sejahtera			42.178,500			42.178.500,00	0,00
5.1.7.05.10	Partai Amanat Nasional			58.234,500			58.234.500,00	0,00
5.1.7.05.14	Partai Kebangkitan Bangsa			91.426,500			91.426.500,00	0,00
5.1.7.05.24	Partai Golongan Karya			229.725,000			229.725.000,00	0,00
5.1.7.05.25	Partai Persatuan Pembangunan			106.375,500			106.375.500,00	0,00
5.1.7.05.29	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan			33.565,500			33.565.500,00	0,00
5.1.7.05.32	Partai Demokrat			83.214,000			83.214.000,00	0,00
5.1.7.05.40	Partai Nasional Demokrat			43.812,000			43.812.000,00	0,00
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			2.422.894,758			1.717.619.758,00	-705.275.000,00

**NUMER KENENING**

**URAIAN**

NUMER KENENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH
		VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga			2.422.894,758,00	1.717.619,758,00	-705.275.000,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga			2.422.894,758,00	1.717.619,758,00	-705.275.000,00
	- Belanja Tidak Terduga	1,00	2.422.894,758,00	1,00	1.717.619,758,00	-705.275.000,00

**TELAH DITELITI OLEH**  
**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
 Pangkajene, .....  
**IRDA S, SH, M.Si**  
 NIP: 19660920 199303 1 011

**PARAF**  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 KABAN  
 SEKRETARIS  
 KABID  
 KONSEPTOR  
 PENGETIK

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
  
**SYAMSUDDIN A. HAMID**

**ARSIP**  
 BAGIAN HUKUM

Lampiran : Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor : Tahun 2018  
 Tentang : Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan  
 Unit Organisasi : 4.04.07 Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.04.07.02 Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH	
		VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH
4	PENDAPATAN			1.192.739.655,101,45		1.190.489.316.239,45	-2.250.338.862,00
4.2	DANA PERIMBANGAN			1.063.362.814.000,00		1.061.112.475.138,00	-2.250.338.862,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			38.547.034.000,00		38.547.034.000,00	0,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak			33.784.789.000,00		33.784.789.000,00	0,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan			13.807.198.000,00		13.807.198.000,00	0,00
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi			19.977.591.000,00		19.977.591.000,00	0,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			4.762.245.000,00		4.762.245.000,00	0,00
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Juran Hak Penguasaan Hutan			13.614.000,00		13.614.000,00	0,00
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Penguasaan			943.027.000,00		943.027.000,00	0,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi			1.232.656.000,00		1.232.656.000,00	0,00
4.2.1.02.13	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara			2.572.948.000,00		2.572.948.000,00	0,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum			752.773.975.000,00		752.773.975.000,00	0,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum			752.773.975.000,00		752.773.975.000,00	0,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum			752.773.975.000,00		752.773.975.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus			272.041.805.000,00		269.791.466.138,00	-2.250.338.862,00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)			54.095.378.000,00		54.095.378.000,00	0,00
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan			10.869.250.000,00		10.869.250.000,00	0,00
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan			2.448.815.000,00		2.448.815.000,00	0,00
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian			3.419.308.000,00		3.419.308.000,00	0,00
4.2.3.01.20	DAK Bidang Kesehatan dan KB			34.155.406.000,00		34.155.406.000,00	0,00
4.2.3.01.21	DAK Bidang Air Minum			1.775.784.000,00		1.775.784.000,00	0,00
4.2.3.01.27	- Air minum			1.775.784.000,00		1.775.784.000,00	0,00
4.2.3.01.27	DAK Bidang Pariwisata			1.426.815.000,00	1 tahun	1.426.815.000,00	0,00
4.2.3.05	- Pariwisata			1.426.815.000,00		1.426.815.000,00	0,00
4.2.3.05.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik			133.939.136.000,00		131.688.797.138,00	-2.250.338.862,00
4.2.3.05.01	DAK Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD			6.094.200.000,00		6.094.200.000,00	0,00
4.2.3.05.02	- DAK Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD			6.094.200.000,00		6.094.200.000,00	0,00
4.2.3.05.02	DAK Tunjangan Profesi Guru			100.241.789.000,00		100.241.789.000,00	0,00
4.2.3.05.02	- Tunjangan Profesi Guru			100.241.789.000,00		100.241.789.000,00	0,00
4.2.3.05.03	DAK Tambahan Penghasilan Guru			1.281.000.000,00		1.281.000.000,00	0,00

**ARSTIP**  
 BAGIAN HUKUM

4.2.3.05.04	- Tambahan Penghasilan Guru DAK Bantuan Operasional Kesehatan	1	Tahun	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	1	Tahun	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00
	- Bantuan operasional kesehatan	1	Tahun	14.529.306.000,00	14.529.306.000,00	1	Tahun	13.664.871.476,00	13.664.871.476,00	-2.250.338.862,00
	- Akreditasi Rumah Sakit	1	tahun	620.000.000,00	620.000.000,00	1	tahun	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00
	- Akreditasi puskesmas	1	tahun	500.000.000,00	500.000.000,00	1	tahun	448.345.813,00	448.345.813,00	-51.654.187,00
	- Jaminan persalinan	1	tahun	3.757.260.000,00	3.757.260.000,00	1	tahun	2.423.009.849,00	2.423.009.849,00	-1.334.250.151,00
4.2.3.05.05	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - dana pelayanan administrasi kependudukan	1	Tahun	1.165.872.000,00	1.165.872.000,00	1	Tahun	1.165.872.000,00	1.165.872.000,00	0,00
4.2.3.05.06	DAK Tunjangan Khusus Guru - Tunjangan Khusus Guru	1	Tahun	3.048.419.000,00	3.048.419.000,00	1	Tahun	3.048.419.000,00	3.048.419.000,00	0,00
4.2.3.05.07	DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1	Tahun	2.701.290.000,00	2.701.290.000,00	1	Tahun	2.701.290.000,00	2.701.290.000,00	0,00
4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus Penugasan		tahun	84.007.291.000,00	84.007.291.000,00			84.007.291.000,00	84.007.291.000,00	0,00
4.2.3.06.01	DAK Bidang Jalan - prioritas daerah	1	Tahun	79.774.500.000,00	79.774.500.000,00	1	Tahun	79.774.500.000,00	79.774.500.000,00	0,00
4.2.3.06.04	DAK Bidang Kesehatan - Unit transfusi darah	1	tahun	3.132.791.000,00	3.132.791.000,00	1	tahun	3.132.791.000,00	3.132.791.000,00	0,00
4.2.3.06.05	DAK Bidang Sanitasi - sanitasi	1	tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1	tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			129.376.841.101,45	129.376.841.101,45			129.376.841.101,45	129.376.841.101,45	0,00
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - Air Minum Pedesaan	1	tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1	tahun	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>			49.861.566.301,45	49.861.566.301,45			49.861.566.301,45	49.861.566.301,45	0,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi			49.861.566.301,45	49.861.566.301,45			49.861.566.301,45	49.861.566.301,45	0,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - Bagi hasil dari PKB	1	tahun	15.128.265.955,45	15.128.265.955,45	1	tahun	15.128.265.955,45	15.128.265.955,45	0,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil dari BBNKB	1	tahun	12.324.789.030,00	12.324.789.030,00	1	tahun	12.324.789.030,00	12.324.789.030,00	0,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	tahun	8.184.995.791,00	8.184.995.791,00	1	tahun	8.184.995.791,00	8.184.995.791,00	0,00
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah	1	tahun	223.515.525,00	223.515.525,00	1	tahun	223.515.525,00	223.515.525,00	0,00
4.3.3.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - Bagi Hasil dari Pajak Rokok	1	tahun	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	1	tahun	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>			68.274.262.000,00	68.274.262.000,00			68.274.262.000,00	68.274.262.000,00	0,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian			68.274.262.000,00	68.274.262.000,00			68.274.262.000,00	68.274.262.000,00	0,00
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah - Dana Insentif Daerah	1	tahun	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1	tahun	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00



Lampiran Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor Tahun 2018

Tentang : Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
 Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penujangan  
 Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan  
 Unit Organisasi : 4.04.07 Badan Pengelola Keuangan Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.04.07.02 Badan Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.493.047.440,00	26.743.386.302,00	2.250.338.862,00
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	22.493.047.440,00	24.743.386.302,00	2.250.338.862,00
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.493.047.440,00	24.743.386.302,00	2.250.338.862,00
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
	Silpa	4.148.622.272,00	4.148.622.272,00	0,00
	Silpa Irigasi	3.671.184.000,00	3.671.184.000,00	0,00
	Silpa tahun 2015 (perikanan)	851.377.728,00	851.377.728,00	0,00
	Silpa bantuan keuangan dari provinsi (pengembangan desimasi wisata bahari)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Silpa dana hibah pasca bencana	9.576.463.440,00	9.576.463.440,00	0,00
	Silpa DAK carry over bidang kesehatan	3.245.400.000,00	3.245.400.000,00	0,00
	Silpa DAK NON Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	864.434.524,00	864.434.524,00
	Silpa DAK Non Fisik Jampensal	0,00	1.334.250.151,00	1.334.250.151,00
	Silpa DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	0,00	51.654.187,00	51.654.187,00
6.1.6	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah			
	Piutang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

PARAF :  
 SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

*(Signature)*  
 SYAMSUDDIN A. HAMID

**ARSIP**  
 BAGIAN HUKUM